



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

Nomor : B/3439 / LG.01.03/3/2024
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Paripurna DPR RI
tanggal 28 Maret 2024

26 Maret 2024

Yth

1. Pimpinan DPR RI
2. Anggota DPR RI

J a k a r t a

Berdasarkan Perubahan Pertama Jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, yang diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 25 Maret 2024, bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mengadakan Rapat Paripurna, yang akan dilaksanakan pada :

- Hari, tanggal : Kamis, 28 Maret 2024
W a k t u : Pukul 09.30 WIB s.d selesai
T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
- A c a r a :
1. Laporan Komisi XI terhadap hasil Uji Kelayakan (*fit and proper test*) Kantor Akuntan Publik (KAP) dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
 2. Laporan BURT DPR RI terhadap Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2025 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
 3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
 5. Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi IX DPR RI tentang Pengawasan Obat dan Makanan dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI;
 6. Pendapat fraksi-fraksi terhadap 26 RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI tentang Kab/kota dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI (Daftar Rancangan Undang-Undang terlampir);
 7. Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

8. Persetujuan Perpanjangan waktu pembahasan terhadap:
- RUU tentang Hukum Acara Perdata;
 - RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi;
 - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
 - RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET);
- dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan.

(Didahului dengan Pelantikan Pengganti Antarwaktu Anggota DPR RI dan Anggota MPR RI Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024).

Sehubungan dengan hal itu, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam Rapat Paripurna tersebut.

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. PIMPINAN
SEKRETARIS JENDERAL
u.b.
KEPALA BIRO PERSIDANGAN I,



ARINI WIJAYANTI, S.H., M.H

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal DPR RI;
 2. Deputi Bidang Persidangan;
 3. Kepala Badan Keahlian;
 4. Deputi Bidang Administrasi;
 5. Inspektur Utama;
 6. Para Karo/ Kapus, Inspektur Setjen DPR RI;
 7. Para Kabag./Kabid.Setjen DPR RI;
 8. Para Kaset Fraksi-fraksi DPR RI.
-

Lampiran
Nomor : B/3439/ LG.01.03/3/2024
Tanggal : 26 Maret 2024

1. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bintan Di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Selatan Di Provinsi Lampung;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Tengah Di Provinsi Lampung;
4. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Utara Di Provinsi Lampung;
5. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Batang Hari Di Provinsi Jambi;
6. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi;
7. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Merangin Di Provinsi Jambi;
8. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Jambi Di Provinsi Jambi;
9. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bengkalis Di Provinsi Riau;
10. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Indragiri Hulu Di Provinsi Riau;
11. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau;
12. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Pekanbaru Di Provinsi Riau;
13. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat;
14. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat;
15. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Padang Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat;
16. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pasaman Di Provinsi Sumatera Barat;
17. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pesisir Selatan Di Provinsi Sumatera Barat;
18. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sijunjung Di Provinsi Sumatera Barat;
19. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Solok Di Provinsi Sumatera Barat;
20. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tanah Datar Di Provinsi Sumatera Barat;
21. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Bukittinggi Di Provinsi Sumatera Barat;

22. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Padang Panjang Di Provinsi Sumatera Barat;
23. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Padang Di Provinsi Sumatera Barat;
24. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Payakumbuh Di Provinsi Sumatera Barat;
25. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Sawahlunto Di Provinsi Sumatera Barat;
26. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Solok Di Provinsi Sumatera Barat.